

## ABSTRACT

The phenomenon of media owners participating in one of the Candidate Pairs has raised public scrutiny. The public appreciates the pro television media for one of the partners having an interest in exposing the negative sides of the opposing party.

1). Why is the independence policy of television media coverage of the 2019 Presidential Election in institutions 2). How to carry out the independence of the television media coverage of the 2019 Presidential Election in justice-based public law institutions ?, 3). How do you respect the independence of television media coverage of the 2019 Presidential Election in a justice-based public law system?

The framework of thinking that delineates between the ideal and what is found later is discovered afterwards which is analyzed through: 1). Theory of Justice (Grand Theory), 2). Election Theory and Law Enforcement Theory (Central Theory), 3). (Applied Theory).

This research method includes: Positivism Research Paradigm, Normative Legal Research Types, Assessment Methods, Explanatory Research Specifications, Types and Sources of Data include primary and secondary data (primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials), Consultation Material collection methods Observations and interviews, qualitative data analysis methods and prioritize the meaning behind the data.

The conclusions of the study are: 1). Television media is still attractive as a means of socialization for presidential candidates. Broadcasting, television media coverage in the 2019 Presidential Election proves that there is a conflict with the principle of impartiality, 2). The independence policy of television media coverage in the 2019 Presidential Election received much attention from various parties. Facts that occur regarding round reporting, criticism from the KPI and also the Press Council., 3). The reconstruction of the comprehensive unity law is no longer carried out through ordinary research, so that its accuracy is more easily accounted for in research conducted using traceability laws new press.

Keywords: Reconstruction, Independence, Media, Election, Justice

## ABSTRAK

Fenomena pemilik media yang bergabung pada salah satu Pasangan Capres menimbulkan sorotan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa media televisi yang pro pada salah satu pasangan memiliki kecenderungan untuk mengekspose sisi-sisi negatif pihak lawan.

Permasalahan penelitian ini meliputi: 1). Mengapa kebijakan independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik belum berbasis keadilan? 2). Bagaimana dampak pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik berbasis keadilan ?, 3). Bagaimana rekonstruksi independensi pemberitaan media televisi terhadap Pemilu Presiden 2019 dalam pranata hukum publik berbasis keadilan?.

Kerangka pikir melukiskan antara yang ideal dan kenyataan kemudian ditemukan adanya kesenjangan setelahnya dirumuskan masalahnya yang dianalisis melalui: 1).Teori Keadilan H.L.A. Hart (*Grand Theory*), 2).Teori Pemilu dan Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*), 3).Teori Komunikasi Agenda Setting (*Applied Theory*).

Metode penelitian ini meliputi: Paradigma Penelitian positivisme, Tipe Penelitian hukum normatif, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian bersifat ekplanatoris, Jenis dan Sumber Data meliputi data primer dan data sekunder ( bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), Metode Pengumpulan Bahan melalui observasi dan wawancara, Metode Analisis Data secara kualitatif induktif yaitu mengutamakan makna di balik data.

Kesimpulan penelitian yaitu: 1). Media televisi masih menarik sebagai sarana sosialisasi bagi para calon presiden. Penyiaran, pemberitaan media televisi pada Pemilu Presiden 2019 membuktikan adanya pelanggaran prinsip tidak berpihak., 2).Kebijakan independensi pemberitaan media televisi dalam Pemilu Presiden 2019 banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Fakta yang terjadi berupa keluhan sejumlah pihak, kecaman dari KPI serta penilaian Dewan Pers., 3).Rekonstruksi undang-undang pers secara keseluruhan seharusnya tidak lagi melalui penelitian biasa, agar akurasi lebih dapat dipertanggungjawabkan penelitian dilakukan dengan menyusun naskah akademik undang-undang pers yang baru.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Independensi, Media , Pemilu, Keadilan